

**THE IMPLEMENTATION ANALYSIS OF ACCRUAL-BASED INSTITUTIONAL ACCOUNTING
SYSTEMS IN RSJ PROF. DR. SOEROJO MAGELANG**

Hermin Dwi Khasanah¹, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti²

^{1&2} Universitas Tidar

Email: khasanahhermin18@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the Accrual Based Institution Accounting System (SAIBA) as the Implementation of PP 71 of 2010 at RSJ Prof. dr. Soerojo Magelang. The research method used is descriptive qualitative, among others, by reducing information, namely summarizing and choosing the main things, focusing on important things obtained by researchers from the field and using preliminary information obtained by interviewing the Accounting Department Staff at RSJ Prof. Dr. Soerojo. The results of this study indicate that the RSJ Prof. Dr. Soerojo was ready and implemented an accrual-based SAP. With good preparedness, this study also shows that the application of the accrual accounting system at RSJ Prof. Dr. Soerojo has done very well.

Keywords: Accrual accounting system; Government accounting standards; PP 71/2010

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL DI RSJ PROF. DR.
SOEROJO MAGELANG**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) sebagai Implementasi PP 71 tahun 2010 di Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif antara lain dengan mereduksi informasi yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh peneliti dari lapangan dan menggunakan *information preliminary* yang diperoleh dengan wawancara kepada Staf Bagian Akuntansi RSJ Prof. Dr. Soerojo. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa RSJ Prof. Dr. Soerojo telah siap dan melaksanakan SAP berbasis akrual. Dengan kesiapan yang baik, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi akrual di RSJ Prof. Dr. Soerojo sudah dilakukan dengan sangat baik.

Kata kunci: Sistem akuntansi akrual; Standar akuntansi pemerintah; PP 71/2010

PENDAHULUAN

Pemerintah telah memberikan kewenangan daerah dalam bentuk otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana publik yang saat ini telah terdesentralisasi ke masing-masing daerah. Pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) yang baik. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Laporan tersebut harus memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. (Nugraha, 2009)

Standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah standar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Adanya ketentuan pemerintah yang baru yaitu PP No 71 tahun 2010 adalah sebuah tonggak awal untuk melakukan perubahan pada pengelolaan keuangan dari *cash basis* menuju *accrual basis*. Pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara meliputi 1) Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 2) Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 3) Undang-undang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara. Dimana dari ketiga Undang-undang tersebut mengandung tiga prinsip manajemen keuangan negara yaitu orientasi pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. (Waluyo, 2011)

Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Jika pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Dua tahun setelah UU 17 Tahun 2003 diundangkan, pemerintah mengeluarkan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP tersebut merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual yang dinamakan Cash toward Accrual. Namun hingga akhir tahun 2008, lima tahun setelah amanat UU 17 Tahun 2003, pemerintah masih belum dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual secara penuh (Kusmanadji, 2014). Baru pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual.

SAP berbasis akrual diatur dan dijelaskan dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Aturan tersebut berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara itu, SAP berbasis kas menuju akrual yang diatur dan dijelaskan pada Lampiran II peraturan tersebut dapat diterapkan oleh entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual sampai dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu tahun 2014. Artinya, pada tahun 2015 ini seluruh entitas pelaporan dan akuntansi sudah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tahun 2015 di pemerintah pusat, ketentuan mengenai aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat menyatakan pada pasal 3 ayat (1) penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan menggunakan aplikasi Terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kesiapan RSJ Prof. Dr. Soerojo dalam menerapkan sistem akuntansi akrual?. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual dan mengetahui peluang dan tantangan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual pada RSJ Prof. Dr. Soerojo.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Madjid & Ashari, 2013). Dalam mengkaji implementasi kebijakan, (Edwards, 1980) menjawab dua pertanyaan penting dalam implementasi yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan gagalnya suatu implementasi kebijakan. Terkait dengan hal itu, terdapat empat aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

Menurut (Edwards, 1980) dari aspek komunikasi, informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat menjalankan kebijakan tersebut. Dari aspek sumber daya, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana kebijakan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Dari aspek disposisi, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan apabila pelaksana tidak

memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sementara itu, implementasi masih akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang didalamnya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD.

Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman, dasar, acuan wajib, serta mempunyai kekuatan hukum didalam menyusun serta menyampaikan laporan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna, auditor dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Menurut (Budiono, 2016), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut (Sinaga, 2005) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi yang berpedoman pada SAP diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP di terapkan pada pemerintah pusat dan kementerian maupun di pemerintah daerah dan dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Manfaat dengan adanya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah informasi dari laporan keuangan lebih terbuka, jujur dan menyeluruh. Selain itu, untuk memudahkan manajemen dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dalam hal kemampuan penerimaan pemerintah dalam membiayai seluruh pengeluaran dan dapat mengetahui beban yang akan datang. Selain itu informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dalam hal ini dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Dan dengan adanya SAP berbasis akrual membuat BPK lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah yang nantinya akan disampaikan kepada para stakeholder dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Pengertian akuntansi berbasis akrual dalam PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen LKPP berbasis akrual adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) menjelaskan bahwa akuntansi basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh akuntansi basis kas, yang mana tujuan dari pelaporan tersebut yaitu tujuan manajerial dan pengawasan. Dari penerapan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya pada saat peristiwa itu terjadi.

Konsep dalam basis akrual didasari pada dua pilar yakni pengakuan terhadap pendapatan dan pengakuan biaya atau beban. Basis akrual mengakui pendapatan pada saat pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam pemahaman konsep akrual, pernyataan kapan kas benar-benar diterima menjadi hal yang tidak begitu penting. Oleh sebab itu, kemudian terdapat kemunculan estimasi piutang tak tertagih dikarenakan kas belum diterima tetapi penghasilan sudah diakui. Sedangkan untuk pengakuan dianggapnya suatu biaya atau beban ketika kewajiban membayar sudah terjadi meskipun biaya tersebut belum dibayar (Zawitri, Kurniasih, & Kartikawati, 2015).

Adapun kesimpulan terhadap pelaksanaan akuntansi berbasis akrual untuk memperbaiki basis kas yang tidak berkecukupan dalam memberikan data yang lebih akurat. Sebagai bentuk dukungan pelaksanaan akuntansi

berbasis akrual dipemerintah pusat, langkah cerdas yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan cara melakukan pengembangan aplikasi SAI (SAKPA dan SIMAKBMN) menjadi SAIBA. Pengembangan tersebut terlihat pada proses modifikasian dari sebelumnya aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) menjadi aplikasi SAIBA (Republik K. K., 2018)

Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian karakteristik kualitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan harus memiliki karakteristik kualitatif yang memadai sehingga laporan keuangan bermanfaat bagi pengambil keputusan. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terdapat empat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

Aplikasi SAIBA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan dan memodifikasi aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam penyusunan LKKL yaitu aplikasi SAKPA menjadi aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA merupakan software yang dirancang sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Proses pengoperasian aplikasi SAIBA sama dengan aplikasi SAKPA yaitu dimulai dari perekaman dokumen, posting buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Perbedaan antara aplikasi SAIBA dan SAKPA terletak pada perekaman migrasi saldo awal neraca, perekaman transaksi DIPA dan Revisi DIPA, serta perekaman transaksi periode berjalan. Perbedaan lain adalah operator aplikasi SAIBA perlu membentuk jurnal penyesuaian sebelum menyusun laporan keuangan untuk menentukan jumlah yang sebenarnya dari setiap akun sesuai dengan basis akrual.

Kesiapan pengguna dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual berdasarkan Teori Technology Acceptance Model (TAM)

Salah satu titik permasalahan dalam perubahan basis terletak pada ketidaksiapan pengguna untuk menerima perubahan serta berkeinginan menjalankan system baru. Apalagi penerapan basis akrual akan membuat banyak perubahan dan perbedaan dari segi prosedur (Ichsan 2013 dalam (Najati, Pituringsih, & Animah, 2016)).

Ada beberapa model dalam penerimaan suatu teknologi informasi baru, salah satunya model yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yaitu Technology Acceptance Model (TAM). (Lestari, 2017) menyatakan bahwa TAM sebagai salah satu model untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam penerimaan (acceptance) atau pemahaman operator/analisis terhadap implementasi aplikasi SAIBA.

Siregar (2011) menyatakan ada dua pertimbangan yang dapat mempengaruhi kemauan terhadap adopsi teknologi informasi diantaranya persepsi terhadap tingkat kemudahan dalam menggunakan teknologi dan persepsi akan mamfaat dari teknologi tersebut.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di RSJ Prof. Dr. Soerojo Kota Magelang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Februari 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk melengkapi metode penelitian kualitatif adalah dengan studi kasus (*case study*). Sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan subjek penelitian dan informan penelitian, yaitu staf bagian akuntansi RSJ Prof. Dr. Soerojo.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengamati dan mewawancarai. Data sekunder diperoleh dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari catatan harian, kegiatan pembelajaran atau dokumen serta informasi-informasi dari pihak yang terkait.

Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive, yakni sengaja memilih sampel (informan) dengan pertimbangan informan terkait langsung dengan penelitian dan memahami situasi dan kondisi yang akan diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara (Sugiyono, 2010) yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara akan peneliti lakukan dengan Staf Bagian Akuntansi pada RSJ Prof. Dr. Soerojo.

Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistic yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi (Supriyati, 2011). Observasi dalam penelitian ini akan langsung dilakukan di RSJ Prof. Dr. Soerojo sebagai obyek penelitian.

Dokumentasi

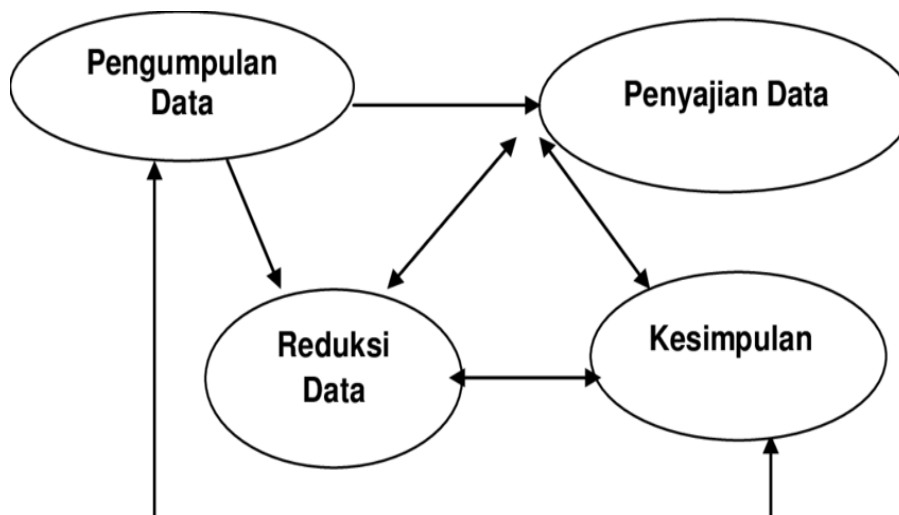
Dokumentasi (Sugiyono, 2011) yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini akan berupa catatan dari hasil wawancara dengan Staf Bagian Akuntansi di RSJ Prof. Dr. Soerojo.

Studi Pustaka

Studi Pustaka (Nazir, 2013) sset pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal/literatur, internet dan perangkat lain yang berkaitan dengan implementasi PP No 71 Tahun 2010 pada sset t pemerintah.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah sset analisis kualitatif. Analisis data penelitian ini dilakukan berpedoman pada sset t-langkah analisis data penelitian kualitatif (Miles & Huberman, 2007) yakni: (1) pengumpulan data, (2) mereduksi data; (3) Menyajikan data, dan; (4) menyimpulkan data. Sedangkan proses analisis data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman.



Gambar 1. Teknik Analisis Data Model Interaktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Objek Penelitian

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu “*Krankzinningengesticht*” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk meyakinkan Pemerintah Hindia Belanda bahwa “*Krankzinningengesticht*” layak sebagai rumah sakit, akhirnya pada tahun 1923 diresmikan sebagai Rumah Sakit Jiwa.

Semula namanya adalah “*Krankzinningengesticht Kramat*”. Setelah adanya perubahan sesuai dengan perkembangan waktu, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian menjadi “Rumah Sakit Jiwa Magelang”. Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat kelas A dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari departemen Kesehatan RSJ Magelang mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan jiwa, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa.

Pada tanggal 6 April 2001 secara resmi nama Rumah Sakit Jiwa Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI No. 1684 MENKES-KESSOS/SK/XI/2000 tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Jiwa Magelang menjadi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.

278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tgl 26 Juni 2007, RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang menjadi Instansi Pemerintah dibawah Dep.Kes. RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Tahun 2009 adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan membuka pelayanan kesehatan non jiwa. Hal ini diperkuat oleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI, No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang. Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof. Dr Soerojo Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15 % dari. Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga medik spesialis meliputi: dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf, spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pelayanan ini didukung juga dengan telah di operasikannya dua (2) ruang untuk rawat inap, kamar operasi, kamar bersalin dan fasilitas pendukung yang lain. Namun demikian RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang tetap menjalankan kegiatan utama dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa. Berikut ini adalah jenis pelayanan unggulan yang diberikan oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo selama ini:

Tabel 1. Jenis Pelayanan Unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo

No	Pelayanan
1	Kesehatan Jiwa: Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, Kesehatan Jiwa Dewasa / Psikiatri Umum, Kesehatan Jiwa Usia Lanjut / Psikogeriatri, Kesehatan Jiwa Forensik & NAPZA, Kesehatan Jiwa Masyarakat, Rehabilitasi Sosial, <i>Consultation Liaison Psychiatry</i>
2	Kesehatan Saraf Terpadu
3	Psikologi
4	Pengobatan Penyakit Dalam Terpadu: Pelayanan Diabetes Terpadu
5	Kesehatan Kebidanan dan Kandungan Terpadu (<i>Obsgyn</i>)
6	Kesehatan Gigi dan Mulut Terpadu
7	Kesehatan Anak Terpadu

Sumber: Profil RSJ Prof. Dr. Soerojo

Pelayanan unggulan RSJ Prof. Dr. Soerojo tersebut diantaranya menjadi sumber pendapatan pada RSJ Prof. Dr. Soerojo. Diantaranya adalah adanya pasien yang menjalani rawat jalan dan rawat inap yang diterima melalui pelayanan dalam RSJ Prof. Dr. Soerojo.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi akrual basis dengan melihat beberapa hal berikut : parameter penerapan PP No 71 tahun 2010, parameter kesiapan SDM terhadap pelaksanaan SAP Basis akrual, parameter komitmen organisasi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter komunikasi terhadap pelaksanaan SAP Basis Akrual, parameter kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, parameter kualitas pelaporan keuangan terhadap pelaksanaan SAP basis akrual, dan terakhir adalah parameter kesiapan sarana prasarana terhadap pelaksanaan SAP. Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo telah memenuhi semua kriteria dalam penerapan SAIBA.

Pembahasan analisis terhadap penerapan sistem akuntansi akrual tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Akan tetapi dari berbagai sisi yang dapat menunjang pelaksanaan sistem akuntansi akrual dalam sebuah entitas. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibahas 7 (tujuh) sset tor yang diperkirakan menunjang pelaksanaan sistem akuntansi. Berikut ini adalah sset t per masing-masing sset tor sebagai parameter penerapan sistem akuntansi akrual pada RSJ Prof. Dr. Soerojo:

Pemahaman PP No 71 Tahun 2010

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semua bagian akuntansi di RSJ Prof. Dr. Soerojo menyatakan telah paham tentang penerapan PP 71 tahun 2010. Pemahaman tentang penerapan PP 71 Tahun 2010 yang telah dikonfirmasi oleh peneliti tentang penggunaan SAP 2010 berbasis akrual yang telah digunakan untuk mengakui pendapatan, beban, sset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo.

Tabel 2 Sumber Pendapatan Semester 1 Tahun 2018 RSJ Prof. Dr. Soerojo

NO	URAIAN UNIT	TARGET	REALISASI	%
1	Rawat Jalan	18.223.135.513	4.616.851.996	25,34
2	Rawat Inap	93.038.665.401	26.514.389.141	28,50
3	Unit Gawat Darura	11.409.419.514	959.393.288	8,41
4	Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	3.540.381.019	571.105.152	16,13
5	Rehabilitasi Psikososial	2.464.084.194	169.036.552	6,86
6	Rehabilitasi Medik	3.111.624.413	1.168.837.544	37,56
7	Radiologi	2.338.951.666	894.623.465	38,25
8	Laboratorium	4.115.432.647	1.243.253.784	30,21
9	Farmasi	8.069.246.295	2.977.853.651	36,90
10	Diklat dan Litbang	2.573.296.463	783.379.893	30,44
11	Informasi, Kesling dan Sewa (manajemen)	24.055.942.231	-	-
JUMLAH		172.940.179.356	39.898.724.466	

Sumber: Profil RSJ Prof. Dr. Soerojo

Parameter Kesiapan SDM Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi kunci sukses keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. (Azwan, 2015) menyatakan SDM yang berkualitas harus mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan pertimbangan integritas, kompetensi, loyalitas, reward, motivasi dan budaya organisasi.

Kesiapan SDM BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo terhadap pelaksanaan SAP berbasis akrual juga dilihat dalam penelitian ini. Hal terlihat bahwa manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo telah memiliki SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan dalam penyiapan dan penyusunan laporan keuangan.

Tabel 3 Jenis Pelatihan Yang Pernah Diikuti SDM BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo

No	Pelatihan	Tahun
1	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah	2010

Sumber: hasil yang diolah, 2020

Selain itu sebagai wujud dari persiapan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah, manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo juga telah menerapkan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktek KKN dan SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

Parameter Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Komitmen organisasi yaitu pihak manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo juga dilihat dalam penelitian ini sebagai faktor penting dalam melihat kesiapan manajemen dalam pelaksanaan SAP Basis Akrua. Kesiapan organisasi tersebut dapat dilihat dari para staf di bagian akuntansi RSJ Prof. Dr. Soerojo yang memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik serta menjunjung visi dan misi pemakaian SAP berbasis akrual. Selain itu juga telah memiliki kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan.

Komitmen organisasi dalam RSJ Prof. Dr. Soerojo ditunjukkan dengan adanya manajemen untuk memantau kehadiran karyawan yaitu finger print bagi seluruh karyawan, adanya *job description* bagi semua posisi jabatan, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan diantaranya adalah jam kerja mulai dari jam 7.30 hingga jam 16.00 di setiap hari senai sampai jumat atau lima hari kerja.

Parameter Komunikasi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Parameter komunikasi terhadap pelaksanaan SAP Basis akrual juga dilihat dalam penelitian ini yaitu apakah manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi yang efektif dalam mengkomunikasikan setiap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual. Dari hasil wawancara di bagian akuntansi RSJ Prof. Dr. Soerojo dapat dilihat bahwa RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang telah melakukan komunikasi yang efektif berupa adanya Panduan Ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016, tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BLU.

Dalam melaksanakan komunikasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua ini, masih ada kendala yang dihadapi oleh staf yang menjadi operator SAIBA yaitu *collecting data* karena harus mencatat seluruh transaksi keuangan rumah sakit dan datanya berasal dari beberapa unit kerja yang ada di rumah sakit.

Parameter Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Kesiapan Sistem Informasi Akuntansi juga dilihat dalam penelitian ini. Selama ini Sistem Informasi Akuntansi yang ada di RSJ Prof. Dr. Soerojo menggunakan Sistem Informasi yang telah di tentukan oleh Kementrian Keuangan untuk mencatat transaksi pembukuan BLU. Dan satu sistem informasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yaitu SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara).

Selain kesiapan Sistem Informasi Akuntansi, manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo juga telah bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik yang telah direkomendasikan oleh BPK untuk mengkondisikan agar pencatatan akuntansi yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan cermat, tepat, akurat dan presisi mulai dari pencatatan transaksi hingga laporan keuangan.

Dalam suatu sistem aplikasi memiliki kendala yang akan dihadapi, begitu juga dengan aplikasi SAIBA. Dalam aplikasi SAIBA kendala yang terjadi adalah seperti adanya revisi SPM (Surat Perintah Membayar) karena adanya data yang menumpuk jadi harus melakukan pengecekan secara manual untuk mencocokkannya dengan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA).

Parameter Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Pelaksanaan SAP Basis Akrua

Kesiapan pelaporan keuangan RSJ Prof. Dr. Soerojo terhadap pelaksanaan SAP basis akrual dilihat dari apakah manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo terutama pada bagian perbendaharaan dan akuntansi telah memahami apa itu Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, dan telah mempersiapkan pelaporan keuangan tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71/2010. Selain itu laporan keuangan tahun 2018 RSJ Prof. Dr. Soerojo juga telah di audit oleh KAP dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

Parameter Kesiapan Sarana Prasarana Terhadap Pelaksanaan SAP

Kesiapan sarana prasarana yang telah ada di RSJ Prof. Dr. Soerojo terhadap pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat dilihat dari kemauan dan integritas RSJ Prof. Dr. Soerojo dalam mempersiapkan sarana ruangan yang memadai untuk operasional perangkat SAP, adanya dukungan sarana administrasi yang memadai, dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia dan adanya pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP. Semua telah dilakukan oleh RSJ Prof. Dr. Soerojo dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam Prosedur SAIBA yang digunakan sudah baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkeu. SAIBA sendiri merupakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua dimana dalam pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan basis akrual. BLU RSJ Prof. Dr. Soerojo sudah menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut dengan baik dan sesuai standar. Namun dalam mengaplikasikan prosedur tersebut masih saja ada masalah yang terjadi pada sistem yang belum stabil.

Dengan melihat hasil yang diperoleh, maka ditemukan beberapa saran yang mungkin berguna. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu butuh dukungan penuh dari manajemen RSJ Prof. Dr. Soerojo dalam melakukan implementasi standar akuntansi keuangan pemerintah yang baru. Standar akuntansi yang baru membutuhkan banyak pembelajaran serta sumber daya manusia yang handal dalam melakukan justifikasi atas setiap transaksi yang ada dalam rumah sakit. Sehingga peneliti menyarankan kepada RSJ Prof. Dr. Soerojo untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan cara memberikan sosialisai disertai pelatihan secara berkala kepada SDM agar implementasi SAP berbasis akrual secara penuh dapat berjalan optimal dan melakukan update software SAIBA agar sistem stabil.

Dalam komunikasi ke unit kerja yang masih kurang efektif dalam memberikan data yang akan diolah pada SAIBA bisa memberikan tenggang waktu atau *deadline* agar semua unit kerja bisa memberikan data sesuai dengan yang telah ditentukan, kalau masih belum terkumpul dari semua unit kerja melakukan bisa dengan mendatangi unit kerja dan memberikan beberapa peringatan untuk tetap memperhatikan *deadline* yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, A. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Persediaan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2015. In *Tesis*. Jakarta: STIA LAN.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press.
- Halim, & Kusufi. (2012). *Akuntansi Berbasis AkruaL*. Jakarta.
- Hermin. (2020). *RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang*. Retrieved from <https://rsjsoerojo.co.id/>
- Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 13-23.
- Indones, R. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU*.
- Kasfari, A., & Abdullah, S. (2019). Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaL (SAIBA) Pada Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 237-244.
- Kusmanadji. (2014). Penerapan Basis AkruaL untuk Pelaporan Keuangan Pemerintah : Perkembangan Global dan Perjalanan Indonesia Menuju Penerapan Basis AkruaL pada 2015. *Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi Infoartha*, 1-12.
- Lestari, D. (2017). Analisis penerimaan aplikasi sistem akuntansi instansi berbasis akruaL (SAIBA) dengan menggunakan pendekatan technology acceptance model (TAM) pada satuan kerja kementerian agama mitra layanan KPPN medan II. Medan: Magister akuntansi, Ekonomi dan bisnis Universitas Sumatera Utara.
- Madjid, N., & Ashari, H. (2013). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), Kajian Akademis BPPK Tahun Anggaran 2013.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Najati, I., Pituringsih, E., & Animah. (2016). Implementasi akuntansi berbasis akruaL : pengujian determinan dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 1-18.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, W. (2009). Pengaruh Pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Keefektifan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik, I. (n.d.). *Peraturan Menteri Keuangan No. 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU*.
- Republik, K. K. (2018, Mei 8). *Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat*. (2014). Retrieved from Proses Bisnis SAIBA: <https://anzdoc.com/modul-overview-proses-bisnis-saiba-program-percepatan-akunta.html>.
- Sari, Y. P., Hestika, & Mahmudah, N. (2017). EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI AKRUAL: STUDI KASUS DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KARDINAH KOTA TEGAL. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol 1*.
- Sinaga, J. (2005). "Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan". www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf .
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati. (2011). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Labkat Press.
- Waluyo, I. (2011). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 1-15.
- Zawitri, S., Kurniasih, N., & Kartikawati, T. S. (2015). Penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akruaL sebagai implementasi PP No . 71 tahun 2010 pada Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* , 24-44.